

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kyai Haji Abdul Halim adalah seorang ulama dan reformis terkemuka di Indonesia, khususnya dalam ranah pendidikan dan kemasyarakatan, yang memiliki corak yang unik. KH. Abdul Halim belajar agama di berbagai pesantren di Wilayah III sejak kecil hingga usia 21 tahun. (Majalengka, Cirebon, Kuningan). Setelah itu, ia segera melanjutkan ke Mekah untuk haji dan melanjutkan studinya. Di sanalah ia berkenalan dengan tulisan-tulisan dan gagasan-gagasan Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani, yang menjadi bahan perbincangan banyak teman-teman Sumateranya. Dia pertama kali bertemu KH. Mas Mansyur, yang akhirnya menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, di Mekkah.

Kekuatan pendorong KH. Abdul Halim adalah untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan karena, selama di Mekah, ia terinspirasi oleh organisasi dua lembaga pendidikan, satu di Bab Al-Salam dekat Mekah dan yang lainnya di Jeddah.¹ Dengan meninggalkan metode tradisional berbasis halaqah, lembaga pendidikan telah mengembangkan sistem pendidikan yang lebih maju, dengan menggunakan kursi dan meja untuk

¹ Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: lintasan sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm:117-120

mengatur kursus dan merancang kurikulum. Sekembalinya ke tanah air, ia terdorong untuk melakukan perbaikan sistem sekolah tradisional di sana.²

Sumber motivasi lain baginya adalah untuk menunjukkan kepada keluarganya, yang terutama priyayi (berpendidikan pemerintah kolonial), bahwa meskipun ia dari rakyat jelata, ia bisa berhasil melayani masyarakat dengan baik.³

Selain sistem pendidikan, KH. Abdul Halim mendirikan PUI, sebuah organisasi rakyat (Perkatan Ummat Islam). PUI aktif di ranah Pendidikan, Sosial, dan Dakwah sebagai organisasi gerakan Islam. Dengan sekolah berbasis *technopreneur*, Persatuan Umat Islam (PUI) kini merintis di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Sementara itu, KH. Ahmad Sanusi menciptakan gerakan Islam Persatoean Oemmat Islam (POII) di Sukabumi pada tahun 1931, yang sebelumnya bernama Al-Ittihadiyatul Islamiyah (AII).

Mulai tahun 1924, Persatuan Ulama secara resmi memperluas operasinya di seluruh Jawa dan Madura, dan selanjutnya di seluruh Indonesia pada tahun 1937. Kemudian, pada tahun 1932, dalam muktamar Ulama di Majalengka, Abdul Halim mengusulkan pendirian lembaga pendidikan yang akan membekali para santrinya. dengan tidak hanya pengetahuan agama dan ilmu umum, tetapi juga pengembangan profesional dan pendidikan. Keterampilan seperti buruh tangan,

² Deliar Noer. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. (Jakarta: Oxford University Press, 1973) hlm: 81

³ Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: lintasan sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm: 117-120

perdagangan, dan pertanian, tergantung pada bakat masing-masing individu.

Perguruan Daarul Uluum dan Balai Pamulangan Pondok Mufiidat Santi Asromo pada tahun 1930 di Majalengka, KH. Ahmad Sanusi membangun Perguruan Samsul Uluum pada tahun 1932 di Gunung Puyuh Sukabumi. Lulusan SGI Daarul Uluum, Santi Asromo, dan Samsul Uluum Gunung Puyuh bisa dikatakan menjadi guru, kyai, kemudian membangun lembaga pendidikan atau pesantren jika tidak bekerja di instansi pemerintah. Ada juga lulusan dari ketiga universitas ini yang berkecimpung di legislatif, bisnis, TNI, Polri, dan organisasi lainnya. Alhasil, Persatuan Umat Islam (PUI) hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan basis massa PUI terbesar di Jawa Barat.⁴

Begitulah pemekaran dan perkembangan Serikat Ulama yang melalui berbagai aktivitasnya semakin menunjukkan eksistensinya. Persatuan Ulama, seperti kelompok lainnya, telah mengadakan kegiatan tabligh sejak awal, dan telah menerbitkan jurnal dan buklet sebagai sarana penyebaran keyakinannya sejak tahun 1930-an.

Dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zymbi Choosakai, para pendiri PUI, KH. Abdul Halim dan KH. Ahmad Sanusi, ditunjuk sebagai wakil rakyat. Berdasarkan Keputusan Presiden No.

⁴ Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: lintasan sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm :119-120

048/TK/Tahun 1992 tanggal 12 Agustus 1992, keduanya dianugerahi Bintang Maha Putera Utama atas jasa-jasanya. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan penghormatan kepada KH. Abdul Halim sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2008.⁵

Hal-hal yang telah disampaikan di atas, kemudian dijadikan dasar oleh peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kiprah K.H Abdul Halim dalam bidang pendidikan Islam, dengan mengambil judul “KIPRAH KH. ABDUL HALIM DALAM ORGANISASI POLITIK TAHUN 1917-1945”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan pokoknya adalah “Bagaimana Kiprah K.H. Abdul Halim dalam organisasi politik pada kurun waktu tahun 1917 sampai dengan 1945”.

Sementara untuk membatasi kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan dari K.H. Abdul Halim?
2. Bagaimana pemikiran-pemikiran politik K.H. Abdul Halim?

⁵ Safroedin Bahar dkk, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992)

3. Bagaimana peran politik K.H. Abdul Halim dari masa penjajahan hingga kemerdekaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan pembatasan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kiprah K.H. Abdul Halim dalam organisasi politik dari kurun waktu tahun 19117 sampai dengan 1945. Adapun tujuan-tujuan khususnya antara lain :

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan dari K.H. Abdul Halim,
2. Mengidentifikasi pemikiran-pemikiran politik seorang K.H. Abdul Halim,
3. Mendeskripsikan kiprah K.H. Abdul Halim di organisasi politik dalam rangka membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia,

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam mengangkat sosok tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Majalengka yaitu K.H. Abdul Halim yang kurang begitu dikenal oleh masyarakat Majalengka.
- b. Memperkaya tulisan-tulisan tentang perjuangan dan kiprah K.H. Abdul Halim khususnya dalam bidang politik.
- c. Hasil tulisan ini sebagai sumbangan informasi terhadap perjuangan dan pengaruh pemikiran K.H. Abdul Halim dalam bidang politik.

d. Menambah wawasan guna mendapat nilai tambah pengetahuan dalam mata pelajaran sejarah di sekolah sebagai perluasan materi mata pelajaran sejarah kelas XI yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Ideologi dan Organisasi Pergerakan Nasional.

1.5. Tinjauan Teoritis

1.5.1. Kajian Teoritis

1.5.1.1. Teori Organisasi

Merupakan tempat berkumpulnya orang dengan sistematis, dipimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala potensi dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Organisasi bisa terbentuk karena beberapa aspek, aspek yang paling mendasar adalah kesamaan visi dan misi dengan perwujudan eksistensi dengan masyarakat. Organisasi yang dianggap adalah organisasi yang mendapat pengakuan dari masyarakat karena memberikan kontribusi yang nyata.⁶

Sukanto Reksohadiprodjo dan Hani Handoko mengatakan organisasi sebagai:

- (1) Suatu lembaga sosial yang secara sadar dikoordinasikan dan dengan sengaja disusun;
- (2) terdiri dari sekumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan;

⁶ Ambarwati, Arie (April 2018). Perilaku dan Teori Organisasi Malang: Media Nusa Creative. hlm. 3.

- (3) mempunyai batasan-batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi dan keberadaanya mempunyai basis yang relatif permanen;
- (4) dan dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁷

Sedangkan Morgon (1986) dalam pandangannya terhadap evolusi organisasi mengatakan organisasi modern yang kompleks memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan tentang teori organisasi dan perilaku orang dalam organisasi mengikuti berkembangnya kemajuan ilmu manajemen dan administrasi publik. Teori mencoba untuk menjelaskan organisasi bagaimana memprediksi tindakan masa depan atau perilaku mereka, teori menyederhanakan untuk membawa fenomena di bawah lensa fokus dalam melihat dan memahami sebuah teori, kemudian, seperti model, berfungsi untuk menjelaskan dan membantu kita memahami apa yang terjadi di dunia sekitar kita. Teori organisasi adalah cara untuk melihat dan menganalisis organisasi yang lebih akurat dan mendalam, melihat dan berpikir tentang organisasi didasarkan pada pola dan keteraturan dalam desain organisasi dan perilaku.⁸

4. 1.5.1.1.1. Teori Klasik

Teori ini biasa disebut dengan “Teori Tradisional” atau disebut juga “Teori Mesin”. Berkembang mulai 1800-an (abad 19). Dalam teori ini organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-

⁷ Sukanto Reksohadiprodjo dan Hani Handoko, Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Perilaku (Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), hlm. 5.

⁸ Richard L. Daft, Organization Theory and Design, South-Western, Cengage Learning, 2010, hlm. 25

tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreatifitas. Dikatakan teori mesin karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Definisi Organisasi menurut Teori Klasik: Organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatankegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama.

Teori Organisasi Klasik memusatkan perhatiannya pada penciptaan suatu himpunan teknik-teknik yang rasional, yang diperlukan dalam mengembangkan baik struktur maupun proses dan juga mengarahkan suatu bentuk koordinasi yang mampu mengintegrasikan hubungan-hubungan antara bagian dari suatu organisasi. Teori Klasik sangat meyakini bahwa jika teknik dan pendekatan yang rasional dapat diwujudkan maka organisasi akan dapat berjalan lebih baik dalam pencapaian tujuan.

Pusat perhatian utama bagi para pemikir teori organisasi klasik ini adalah organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis. Hal ini dapat dipahami karena organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis itu, selain mudah dipelajari juga mengharuskan adanya proses dan struktur yang rasional untuk mencapai efisiensi. suatu ciri yang selalu terlekat pada organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis. Meskipun demikian, pada perkembangannya kemudian lingkupnya meluas pada semua tipe

organisasi, tetapi tetap dengan esensi yang sama, yaitu menekankan segi rasionalitas dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

5. **1.5.1.1.2. Teori Organisasi Neoklasik**

Sebetulnya teori ini muncul setelah adanya perubahan pada teori klasik terutama setelah diperkenalkan ilmu pengetahuan tentang manusia. Teori ini juga timbul dikarenakan teori klasik dianggap tidak dapat sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keselarasan kerja. Tokoh yang berperan dalam perkembangan teori ini beberapa diantaranya adalah Elton Mayo dan Hawthorne.⁹

6. **1.5.1.1.3. Teori Organisasi Modern**

Teori modern melihat semua unsur dalam organisasi dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam teori ini menyebutkan bahwa apabila organisasi ingin mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya haruslah memiliki sistem yang terbuka yang terhubung dengan lingkungannya. Teori modern adalah multi disiplin dengan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, berinteraksi dengan bagian-bagian dan fungsi-fungsi dalam organisasi ataupun dengan organisasi lain dan lingkungannya.¹⁰

Organisasi memiliki kerja yang sangat kompleks, dinamis, multi level, multi dimensional, multi variable, dan probabilistik. Organisasi

⁹ Sukanto Reksohadiprodjo dan Hani Handoko, Organisasi Perusahaan, hlm. 39.

¹⁰ Ibid hlm. 49.

terdiri dari antar hubungan bagian-bagian sistem, sebagai sistem organisasi terdiri dari: unsur struktur, unsur proses, dan unsur perilaku organisasi.

1.5.1.2. Teori Big Man

Teori *Big Man* merupakan salah satu dari sekian banyak teori kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari masalah budaya politik yang pernah ada dalam sejarah peradaban bangsa. Budaya politik merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, norma dan aktivitas politik dari suatu masyarakat. Sejarah memperlihatkan bahwa budaya politik juga mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam perkembangannya, budaya politik yang dipakai seorang pemimpin negara telah mengalami perubahan yang disebabkan budaya dari luar. Globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi tidak dapat dipungkiri mampu masuk dalam lini kehidupan sehari-hari masyarakat bahkan di pelosok Indonesia. Yang unik, ternyata profil seorang pemimpin dan budaya politik mereka dalam meraup massa hampir tidak mengalami perubahan. Sejarah menunjukkan bahwa profil atau sosok seorang pemimpin di mata masyarakat sangat penting terutama saat masyarakat melihat dalam pandangan pertama.

Teori “*Big Man System*” dalam buku Ted. C Lewellen; *Political Anthropology, an introduction*¹¹ menjadi penanda awalnya pada era *pre-*

¹¹ Lawellen, Ted C, *Political Anthropology, An Introduction*, 1980, hlm. 18.

industrial political system (sebelum masuk ke sistem politik industri) bahwa calon pemimpin sebuah masyarakat atau komunitas pasti dicari yang berbadan besar, menonjol di antara yang lain, wajah menawan, postur tubuh sempurna setidaknya enak dipandang bila dibandingkan dengan calon lainnya. Hal ini menandakan *first sight* (pandangan pertama) adalah fisik yang menentukan seseorang layak menjadi pemimpin atau juara dalam sebuah kompetisi.

1.5.1.3. Teori Politik Islam

Secara umum, politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum dan politik dalam arti kebijaksanaan. Politik dalam arti kepentingan umum adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan, politik dalam arti kebijakan adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang di kehendaki. Kebijakan merupakan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya. Kepentingan umum dan kebijakan merupakan hubungan yang erat dan timbal balik.

Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap nilai-nilai Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini, terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari doktrin. Perpaduan antara cita-cita dan doktrin-doktrin tersebut dipahami secara komprehensif sebagai suatu

keseluruhan. Jika kata politik dikaitkan dengan Islam maka politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Umat Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung berpolitikan Islam ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam), karenanya maka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme kegamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah ke-Islaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.

Dalam aspek politik perlu dicatat bahwa semasa Nabi, beliau telah mendirikan tatanan sosial politik Islam di Madinah. Namun, setelah lebih dari tiga abad kemudian, para pemikir hukum baru merumuskan teori politik mereka secara lebih sistematis. Diantara mereka yang cukup populer adalah al-Mawardi dan al-Ghazali. Pada umumnya, kepada kedua ulama Sunni itulah yang mengkonstruksikan pandangan politiknya. Menurut Al-Mawardi konsep politik Islam didasarkan atas adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umat-Nya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi untuk mengamankan agama disertai mandat politik. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik.¹²

¹² Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UI-Press, (1993), 63

Al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan imam adalah wajib. Pemikiran al-Ghazali tentang hal ini dapat dilihat dalam karyanya *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (sikap lurus dalam I'tiqad). Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik, dengan ungkapan :¹³

“sultan (disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan diakhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya”.

Apa yang diungkapkan oleh al-Ghazali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh al-Mawardi tersebut, tentang bentuk pemerintahan, kewajiban mendirikan suatu pemerintahan, dan mengangkat imam yang berfungsi untuk mengurus pemerintahan agama dan dunia.

1.5.2. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kajian buku-buku inti yang digunakan oleh penulis untuk dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini

1.5.2.1 K.H. Abdul Halim

Buku yang digunakan penulis ini adalah tentang biografi K.H Abdul halim yang di tulis oleh Dr.H. Wawan hernawan,M Ag. yang terbit

¹³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam :Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Kencana, (2010), 28

pada September 2018 buku ini mengulas tentang perjalanan hidup dari K.H. Abdul halim selain itu di buku ini pun terdapat beberapa pemikiran dari K.H. Adul halim. Buku ini terlihat merekam sejarah keberadaan sosok pahlawan, dengan tujuan agar kualitas pertempurannya dapat diberikan untuk masa depan¹⁴. K.H. Abdul halim adalah tokoh pemuka agama yang sangat berjasa pada perkembangan organisasi Islam dan Pendidikan di kabupaten Majalengka Abdul Halimi adalah pejuang dan penggerak organisasi massa Islam yang hidup pada 1887-1962. Gerak perjuangannya telah dimulai sejak kepulangannya dari Mekkah pada 1911. Selama hidupnya telah memimpin dan melakukan perjuangan politik baik yang didedikasikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, perang kemerdekaan hingga wafat menjemputnya. Melalui organisasi yang dipimpinnya sejak Madjlisoel 'Ilmi pada 1911, berturut-turut ia mendirikan Hajatoel Qoeloeb, Jami'at I' anat Muta'alimin, Persjarikatan Oelama, Perikatan Umat Islam hingga Persatuan Umat Islam (PUI) pada 1952.

Meskipun program kerja organisasi-organisasi yang didirikan Halim lebih berorientasi pada pendidikan, dakwah, dan sosial, namun tidak jarang mewakili organisasi yang dipimpinnya ia terlibat dalam bidang politik. Jabatan Comisaris Bestuur Central Sarekat Islam Hindia Timur untuk wilayah Jawa Barat, anggota Cuo Sangi 102 *Biografi K.H. Abdul Halim (1887-1962)* In, anggota Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, dan

¹⁴ Wawan hernawan, *Biografi KH. Abdul halim*. Bandung, LP2M UIN SGD, 2018, hlm. 3.

Ketua Umum Gerakan Muslimin Indonesia (GMI); Ketika berlangsung sidang-sidang BPUPKI, Halim menjadi anggota Panitia Pembelaan Tanah Air; anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Keresidenan Cirebon, Bupati masyarakat Majalengka; Anggota konstituante; dan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta inilah yang menjadi bukti nyata atas perjuangan Abdul Halim dalam bidang politik yang tak terbantahkan.

1.5.3. Hasil Penelitian yang Relevan

Jurnal Syifa Riyanti Putri mahasiswa Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017 dengan judul "Kiprah K.H. Abdul Halim dalam Bidang Politik dan Pendidikan Tahun 1911-1962".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa K.H. Abdul Halim lahir dengan nama asli Mohammad Sjatori pada 17 Juni 1887 dari pasangan K.H. Muhammad Iskandar dan Hj. Siti Mutmainnah di Majalengka. Pendidikannya hanya mendapat pendidikan agama Islam dari pesantren, dan belajar membaca dan menulis huruf Latin dan Belanda dari seorang pendeta bernama Van Hoeven. Karyanya dalam kemajuan bangsa Indonesia diciptakan melalui dua bidang, yaitu pendidikan dan politik. Di bidang pendidikan ia mendirikan Dewan Organisasi dan Ilmu Hayatul Qulub pada tahun 1911-1912, Organisasi Madrasah dan I'natull Muta'alimin (1916), PO Sekolah Kweek (1917-1920), dan Pesantren Santi Asromo (1932).). Di bidang politik, K.H. Abdul Halim menjadi Ketua

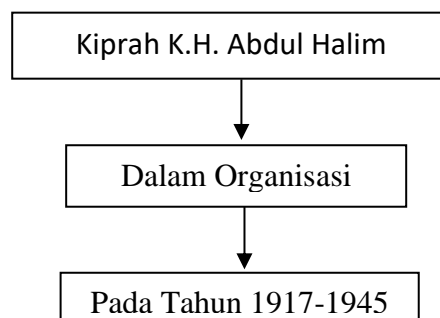
Syarikat Islam Majalengka (1912), Dewan Majelis Islam A'la Indonesia (1938), Anggota Chuo Sangi In dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (1943-1945) , mendirikan organisasi Persatuan Ummah Islam (Persatuan Umat Islam). 1952). Keberadaan K.H. Abdul Halim dalam politik di Indonesia menjadikannya Pahlawan Nasional pada tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Persamaan dalam karya tulis Syifa adalah tokoh utama yaitu KH. Abdul Halim dan juga sebagian karir politiknya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Adapun perbedaan penelitian Syifa adalah diantaranya topik yang tidak hanya mencakup kiprah politik namun juga membahas peranan KH. Abdul Halim dalam bidang pendidikan.

1.5.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

K.H. Abdul Halim merupakan salah seorang tokoh pejuang Indonesia yang memiliki peran penting dalam memajukan bidang pendidikan khususnya di Kab. Majalengka pada saat itu yang sampai saat sudah tersebar di beberapa daerah. Namun K.H Abdul Halim juga memiliki peran penting dalam bidang politik terkhusus keikutsertaannya dalam organisasi politik. Karir politiknya yang menonjol adalah dengan mendirikan Persjarikatan Oelama (PO) tahun 1917 hingga bergabungnya dengan Dewan Pertimbangan Pusat atau dalam bahasa jepang disebut *Chuo Sangi In* 1945. K.H. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang kiprahnya dalam organisasi politik dari tahun 1917 sampai menjelang kemerdekaan tahun 1945.

1.6. Metode Penelitian

Upaya yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah, yaitu dengan melakukan 4 langkah metode penelitian sejarah, pertama pengumpulan sumber (heuristik) yang dilakukan dengan menelusuri arsip serta buku-buku yang terkait dengan K.H.Abdul Halim. Kedua, kritik baik kritik eksternal maupun kritik internal. Ketiga, interpretasi yang merupakan penafsiran dan analisis dari fakta-fakta yang telah didapatkan yang telah diuji keotentisitasannya. Keempat, historiografi yaitu tahapan penyusunan dari seluruh rangkai metode penelitian dalam bentuk tulisan.¹⁵

¹⁵ Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.43.

Teknik pengumpulan data sangat penting guna memberi pemahaman yang menyeluruh tentang topik permasalahan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data ditempuh adalah studi kepustakaan. Menurut Koentjaraningrat teknik studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah, dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan di dalam perpustakaan.

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem kartu yang digunakan untuk mencatat atau kutipan dari setiap data yang diperoleh yang kemudian dicatat dalam lembaran-lembaran kartu dengan mencantumkan identitas sumber.¹⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode historis. Metode historis adalah proses penyajian dan analisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang terdapat dalam historiografi. Secara lebih sistematis, beberapa penulis sejarah menguraikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam metode historis Ismaun mengungkapkan beberapa langkah yang harus dilakukan dalam metode historis yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.¹⁷

¹⁶ M. Iyus Jayusman. (2008). *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Tasikmalaya: Ndhit Comp

¹⁷ Ismaun (2001). *Paradigma Pendidikan Sejarah yang terarah dan bermakna*. dalam Historia

Adapun langkah-langkah yang dimaksud yaitu:

1.6.1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu usaha mencari dan menemukan sumber sejarah. Secara sederhana, sumber-sumber sejarah itu dapat berupa: sumber benda, sumber tertulis dan sumber lisan. Secara luas lagi, sumber sejarah juga dapat dibeda-bedakan ke dalam sumber resmi formal dan informal. Selain itu dapat diklasifikasikan dalam sumber primer dan sekunder. Sumber sejarah sendiri merupakan segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan penulis diantaranya:

1. Buku Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim Karangan Miftahul Falah
2. Buku Teologi K.H. Abdul Halim. Ikhtiar Melacak Akar-akar Pemikiran Teologi Persatuan Ummat Islam (PUI).
3. Buku Biografi K.H. Abdul Halim (1887-1962) Karangan Wawan Hermawan
4. Buku Potret K.H. Abdul Halim Dalam Eksistensi Nasionalisme dan Perbaikan Umat 1887-1962. Karangan Sukarsa Datum
5. Buku “K. H. Abdul Halim; Hidup dan Perjuangannya” dalam Panji Masyarakat. Karangan Sjahid Hidayat
6. Buku K.H Abdul Halim Iskandar dan Pergerakannya Karangan Wanta

Pada tahapan ini mampu mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya dalam upaya merekonstruksikan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Tahap heuristik merupakan suatu cara dalam menemukan serta menghimpun sumber-sumber data yang ditemukan diberbagai tempat. Dalam melakukan heuristik tidak diperlukan peraturan-peraturan yang sifatnya umum sebab heuristik merupakan suatu teknik yang memerlukan terampilan dalam mencari data seperti sumber informasi dan jejak-jejak sejarah dimasa lampau. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti diantaranya:

1.6.2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan.

1.6.3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Data dalam studi dokumen dikumpulkan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik dan hasil yang dilaporkan berupa analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Sumber dokumen ini berupa dokumen resmi pemerintah yang telah disahkan, ataupun dokumen rancangan pemerintah yang belum disahkan.

1.6.4. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dimana peneliti mencatat informasi selama penelitian. Data observasi berupa deskripsi yang faktual dan terperinci mengenai lapangan, kegiatan kemanusiaan, dan situasi sosial serta di mana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Dalam metode observasi dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya manusia. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan informasi. Beberapa observasi yang telah dilakukan yaitu:

1. Perpustakaan Universitas Siliwangi
2. Perpustakaan Kota Tasikmalaya
3. Perpustakaan Kab. Tasikmalaya

1.6.5. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan tahap menyingkirkan bahan-bahan yang tidak autentik, usaha menilai sumber-sumber sejarah. Semua sumber dipilih melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Tahapan kritik sumber ini dibagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal merupakan kegiatan untuk menguji kredibilitas atau realibilitas sumber atau data yang diperoleh, kritik eksternal merupakan kegiatan untuk menguji keautentikan sumber atau data yang di peroleh. kritik internal merupakan kegiatan untuk menguji kredibilitas atau realibilitas sumber atau data yang diperoleh.

1.6.6. Interpretasi

Interpretasi sendiri yaitu usaha memahami dan mencari hubungan antar fakta sejarah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan rasional. Dalam tahap ini pula peneliti menafsiran berbagai sumber yang telah diperoleh. Kecermatan dan sikap objektif sangat diperlukan pada tahap ini, terutama dalam interpretasi subjektif dalam fakta sejarah. Hal ini memerlukan penalaran kritis dari penulis agar proses penafsiran bisa berjalan dengan lancar. Pada tahap interpretasi dan historiografi fungsi utamanya terletak pada interpretasi. Interpretasi merupakan menafsirkan sebuah fakta atau bukti dalam kerangka rekontruksi sejarah dimasa lampau. Fakta-fakta sejarah masih nampak dalam berbagai bentuk seperti peninggalan dan dokumen, itu semua hanya realitas dimasa lampau maka

diperlukan rekonstruksi fakta sejarah dimasa lampau agar menghasilkan relasi antar fakta yang ada.

1.6.7. Historiografi

Historiografi merupakan tahap penulisan kisah sejarah. Yang merupakan tahap rekontruksi penulisan data sejarah oleh sejarawan menjadi kisah sejarah yang dapat diterima oleh publik. Tahapan historiografi merupakan tahapan akhir data penulisan sejarah menggabungkan berbagai data yang telah diperoleh dan menyusunnya berdasarkan garis waktu.

1.7. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dari penulisan. Dalam bab ini, penulis berusaha untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan mengenai gambaran umum tentang kondisi dan keadaan organisasi yang berazaskan Islam ketika memasuki fase pergerakan nasional dan juga sosok K.H. Abdul Halim. Untuk memperinci dan membatasi permasalahan agar tidak melebar maka dicantumkan rumusan dan batasan masalah sehingga dapat dikaji secara khusus dalam penulisan ini. Pada akhir dari bab ini akan dimuat tentang metode dan teknik

penelitian, juga sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka dan pedoman penulisan karya ilmiah ini.

Pada Bab II akan dibahas mengenai profil K.H Abdul Halim mengenai latar belakang keluarga beliau kemudian akan dijelaskan riwayat pendidikan hingga aktivitas keseharian dan cara berpikirnya.

Pada Bab III akan dibahas mengenai bagaimana latar belakang berdirinya Persjarikatan Oelama (PO) sebagai salah satu langkah yang membuat sosoknya tidak dapat dremehkan.

Bab IV akan dibahas mengenai peran dan keikutsertaan KH. Abdul Halim dalam organisasi politik dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Bab V simpulan dan saran akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang ditarik oleh penulis dan saran atas penelitian yang telah dilakukan. Daftar pustaka disusun sumber-sumber yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.